

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa investasi berkaitan dengan fasilitas pertanahan khususnya hak atas tanah yang berada di Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah dilakukan berdasarkan beberapa penyelesaian, salah satunya penyelesaian sengketa investasi berbasis hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa tanah yang serupa dengan tanah enclave dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat atau tanah adat, karena tanah enclave masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal dan secara umum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebut sebagai hak ulayat. Penjelasan mengenai definisi tanah enclave pada kasus di pulau Lombok ini yaitu tanah enclave sebagai tanah masyarakat adat yang sudah menjadi tanah adat perorangan yg berada di kawasan pengembang Kuta Mandalika yaitu PT. *Indonesian Tourism Development Corporation* (ITDC) yang belum di bebaskan untuk pembangunan sirkuit motoGP. Pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kata Kunci: *investasi, tanah, hukum adat*

ABSTRACT

Settlement of investment disputes related to land facilities, especially land rights in Kuta Mandalika, Central Lombok Regency, is carried out based on several solutions, one of which is the settlement of investment disputes based on customary law. The research method used is normative legal research method. This research explains that land similar to enclave land can be categorized as ulayat or customary land, because enclave land is still regulated under local customary law and is attached to communal rights and in general in Article 3 of Law Number 5 Year 1960 regarding Basic Regulations. Agrarian Principles (UUPA) are called customary rights. The explanation regarding the definition of enclaved land in the case on the island of Lombok is enclaved land as customary community land which has become individual customary land in the Kuta Mandalika development area, namely PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) which has not been released for the construction of the MotoGP circuit. Land acquisition for the construction of the MotoGP circuit in the Kuta Mandalika Special Economic Zone (KEK) is included in land acquisition for public interests, as regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest.

Key Word : investment, land, customary law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI BERDASARKAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KUTA MANDALIKA)”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku ketua bagian Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. dan Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. sebagai pembimbing tesis serta menguji tesis ini yang dengan senantiasa menyediakan waktu untuk membimbing, mengajar, menasihati penulis hingga terselesainya tesis ini.
4. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) serta menguji tesis ini yang senantiasa membimbing dalam

menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang terkait dalam bab pembahasan pada tesis ini.

5. Para dosen penguji tesis, ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. dan ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. yang telah menguji, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis.
6. Dosen-dosen pengajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan.
7. Seluruh staff administrasi dan akademik di Magister Ilmu Hukum yang senantiasa membantu dalam segala hal terkait perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta ayahanda Agus Mulyadi, S.E., M.E. dan Ibunda Marianah yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, membimbing dan memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan dengan dorongan moril dan materil untuk bantuan penuh dalam mengerjakan tesis ini.
9. Adik-adik tersayang, Sitira Novitasari, S. Ak. dan Siti Maylitha Rahma yang selama ini selalu memberikan semangat dan setia menemani disetiap saat baik senang maupun susah serta menyemangati agar menjadi yang terbaik dan terdepan.
10. Seluruh keluarga besar, terima kasih atas do'a dan dukungan semangat dalam mengarungi langkah-langkah untuk selalu menjadi yang terbaik.
11. Untuk Kristi Fosa Akwila dan Lely Mahartina yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan selama berada di kampus Fakultas Hukum Unair maupun diluar kampus.

12. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini yang banyak membantu memberikan dukungan dan memberikan arti indah pertemanan.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 15 Mei 2020

Penulis

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Burgerlijk Wetboek (*Staatsblad 1847 Nomor 23*)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066)